

**ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA PADA DESA
DALISODO KECAMATAN WAGIR KABUPATEN MALANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Manajemen

MANAJEMEN



Oleh:

FRANSISCHA AULIA DWI TUDY

2019120225

UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI

FAKULTAS EKONOMI

MALANG

2023

RINGKASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pengurus dalam penjabatan simpanan kota dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong dan menghambat pengawasan penunjukan cagar kota di Kota Dalisodo, Kawasan Wagir, Rezim Malang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara terhadap empat narasumber, yaitu bupati, sekretaris, pemodal, dan warga Kota Dalisodo. Selain itu, dokumen seperti laporan rencana pengeluaran keuangan Kantor Kota Dalisodo tahun 2022 juga digunakan sebagai sumber informasi. Setelah proses reduksi informasi, penyajian informasi, dan penarikan kesimpulan, data yang diberikan selanjutnya dianalisis secara visual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penyaluran tabungan daerah di Kota Dalisodo, Rezim Malang, terdapat sejumlah proses penting yang terlibat dalam pengelolaan keuangan. Perencanaan dilakukan melalui pertemuan vila dan penyesuaian proyek kota sesuai dengan rencana pengeluaran. Pelaksanaan melibatkan pencatatan semua penggunaan dan pembayaran kota. Pengorganisasian juga merupakan faktor penting dengan mengkoordinasikan kerjasama antar pemerintah kota. Pengungkapan informasi keuangan kota dilakukan dengan menerbitkan laporan pengakuan, tanggung jawab, dan keuangan. Faktor pendukung dalam pengelolaan ini termasuk dukungan masyarakat terhadap pembangunan kota, adanya peralatan kantor yang memadai, kerja sama antar pemerintah kota, dan pengetahuan serta pengalaman luas dari pejabat kota dalam mengelola simpanan kota.

Kata Kunci: Pengelolaan Dana Desa, Pemerintah Desa, Keuangan Desa.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat teritorial yang diakui mempunyai kekuasaan untuk mengendalikan dan mengawasi urusan pemerintahan serta mewakili kepentingan lingkungan sekitar. Struktur pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia memperhatikan hak-hak sejarah dan tradisional kota dalam hal pengelolaan lembaga eksekutif. Dalam situasi khusus ini, batasan kewenangan pemerintah daerah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan dan kemajuan lingkungan metropolitan.

Penjaminan sumber daya kota dan dewan keuangan kota berada di bawah pengawasan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Bantuan yang diberikan daerah atau kota dalam hal pendapatan wilayah atau sehari-hari sangat berpengaruh terhadap cara kota mengelola keuangannya. Sistem moneter metropolitan digunakan setelah memperhitungkan pengecer terkemuka. Cadangan kota (Town Asset Portion/ADD) harus digunakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Toko kecil ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan masyarakat dan kotamadya.

Rencana belanja ADD telah memberikan dana kepada Pemerintah Kota Dalisodo untuk pengelolaan pendapatan desa khususnya untuk perbaikan infrastruktur. Divisi administrasi keuangan dan organisasi dengan fokus pada ADD memberikan dukungan dalam pengelolaan dana. Kepala kota dan Badan Permusyawaratan Kota (BPD) menjunjung tinggi peraturan daerah yang tidak resmi dan bertugas mengelola cagar alam kota. Mempertahankan kemandirian kota memerlukan pendanaan, dan pemerintah daerah dilibatkan dalam perencanaan dan pengawasan penggunaan sumber daya tersebut.

Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pemkot juga turut berkontribusi membangun kota, melaksanakan tugas administrasi, melakukan perbaikan, dan meningkatkan jaringan. Pemerintah kota memainkan peran kunci dalam perencanaan acara dan upaya pembangunan sosial. mendistribusikan laporan pengakuan rencana keuangan (LRA), yang

memberikan laporan rinci tentang penggunaan aset kota. Diperlukan pengelolaan keuangan kota yang lugas dan andal.

Dalam menangani tanggung jawab yang rumit, pemerintah desa harus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, pertumbuhan masyarakat, dan lingkungan sekitar. Keterlibatan masyarakat sangat penting dalam pengendalian penyaluran uang desa dan pembangunan desa. Tujuan penyaluran dana ke desa adalah untuk meningkatkan pelayanan, perekonomian, dan kesenjangan pembangunan antar desa. Pengelolaan cagar alam kota juga dipengaruhi oleh faktor represif dan faktor pemungkin.

Secara keseluruhan, alokasi cadangan kota dan pengelolaan moneter metropolitan merupakan faktor penting dalam memajukan pertumbuhan dan pembangunan kawasan perkotaan. Pedoman, dorongan, dan dukungan masyarakat, antara lain, memainkan peran penting dalam mengelola cagar alam kota dan memastikan keberhasilan dan keberlanjutan administrasi kota.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul: **“Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Dalisodo, Kecamatan Wagir Kabupaten Malang”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka pokok bahasannya akan dibahas lebih mendalam sebagai berikut:

1. Seberapa efektifkah perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, perincian, dan tanggung jawab keuangan kota dalam pengelolaan pembagian aset?
2. Unsur apa saja yang mempengaruhi penetapan cagar kota di Kawasan Wagir Kabupaten Malang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah:

1. Pelajari tentang tata kelola yang digunakan untuk mendistribusikan uang tunai kepada masyarakat, yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, dan tanggung jawab atas tindakan keuangannya.
2. Mengetahui variabel-variabel yang mempengaruhi pengelolaan dana desa Dalisodo secara finansial. Kabupaten Malang dan Wagir.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti

Penelitian ini digunakan sebagai dasar untuk memperluas wawasan sehingga dapat menambah pengetahuan, informasi, dan pengalaman terkait topik yang telah diteliti dan sebagai syarat untuk memperoleh sertifikasi empat tahun.

2. Bagi Desa

Kajian ini dilakukan di Desa Dalisodo, Kecamatan Wagir, dan diyakini masyarakat akan mendapatkan manfaat serta memberikan masukan dalam pengelolaan alokasi anggaran desa (ADD).

3. Bagi akademik

Kajian ini diharapkan dapat menjadi sumber ilmu bagi kemajuan akademik dan sumber bagi para sarjana selanjutnya. tentang peneliti yang sama pada khususnya

DAFTAR PUSTAKA

- Andi, Prastowo. (2012). *Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif*. Yogyakarta: Diva Press.
- Ferdinand. (2013). *Metode Penelitian Manajemen*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gunawan, C. I. (2016). *Sistem Informasi Manajemen dan E-Government*. Purwokerto: Penerbit CV. IRDH (Research and Publishing).
- Hutami, A.S.S. (2017). *Analisis Pengelolaan alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo*. Staf Pemerintah Kabupaten wajo
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo, (2002). *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Edisi Pertama. BPFE. Yogyakarta.
- Moleong, Lexy. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Jakarta: Remaja Rosda Karya.
- Muliawan, I., Sasmito, C. dan Gunawan, C. I. (2019). *Implementasi Penyaluran Dana Desa Di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat*. *Jurnal Ilmu Administrasi*. Vol.16, No.1:97-111.
- Nurlaila. (2010). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Penerbit LepKhair. Ternate.
- N. Daldjoeni. (2011). *Interaksi Desa-Kota*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 *tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 *tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 *tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang*.
- Pupita Sari, Dwi. R. (2001). *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa*. Desa Bulu, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Kediri.
- Sahdan, G, Dkk. (2004). *Buku Saku Pedoman Alokasi Dana Desa*. Yogyakarta: FPPD.
- Sutoro, E. (2015) *Regulasi Baru, Desa Baru*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Suharto. (2010). *Membangun masyarakat dan Memberdayakan Rakyat*. PT. Refika Aditama: Bandung.
- Sanusi, Anwar. (2012). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung Alfabeta.

Susanti, R. A. D. & Lestari, A. W. (2022) *Accountability of Village Fund Allocation Management in Landungsari Village, DAU District, Malang Regency*. JBMP: Jurnal Bisnis, Manajemen dan Perbankan. Vol: 8/ No. 1.

Thomas. (2013). *Pengelolaan alokasi dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sebawang Kecamatan Sesayah Kabupaten Tanah Kidung*. E-Journal Pemerintah Integratif.

Tersiana. (2018). *Metodologi Penelitian*. Penerbit Yogyakarta.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang *Desa*.

Wiratna, S. V. *Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Jakarta: Pustaka Baru Press.

Wasistiono, Sadu dan Irwan Tahit. (2006). *Prospek Pengembangan Desa*. Jatinangor.

Widjaja, H. (2004). *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persad.